

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG AJAK MASYARAKAT HADAPI HOAKS DENGAN “TUJUH JURUS FAKTUAL”

BANDAR LAMPUNG, 05 Mei 2025 - Dalam menghadapi derasnya arus informasi menjelang momentum politik ke depan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung mengingatkan pentingnya literasi digital dan kewaspadaan terhadap berita bohong atau hoaks yang berpotensi menimbulkan disinformasi dan gangguan terhadap kehidupan demokrasi. Melalui kampanye edukatif bertajuk “Hadapi Hoaks dengan Tujuh Jurus Faktual”, Bawaslu Lampung mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih cerdas dan bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, khususnya di media sosial.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa penyebaran hoaks bukan hanya persoalan informasi salah, tetapi juga ancaman serius terhadap kepercayaan publik dan stabilitas sosial.

“Hoaks bukan sekadar kabar palsu, tetapi bisa menjadi alat provokasi yang membelah masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk mengenali, menilai, dan meluruskan informasi yang tidak benar. Bawaslu Lampung berkomitmen untuk terus mengedukasi publik melalui pendekatan literasi faktual,” ujar Iskardo.

Lebih lanjut, Bawaslu Lampung merumuskan “Tujuh Jurus Faktual” sebagai panduan praktis bagi masyarakat dalam menghadapi hoaks di era digital. Tujuh langkah ini dirancang agar mudah diterapkan oleh siapa pun dalam kehidupan sehari-hari, baik di ruang publik maupun di media sosial.



Pertama, Fokus pada Emosi. Hoaks kerap memanfaatkan sisi emosional pembaca dengan menimbulkan rasa marah, takut, atau benci. Dengan mengenali emosi yang muncul saat membaca suatu informasi, masyarakat dapat lebih berhati-hati dan tidak mudah terpancing.

Kedua, Amati Secara Menyeluruh. Masyarakat diimbau untuk tidak hanya membaca judul berita. Sering kali, hoaks disamarkan melalui judul bombastis yang tidak sesuai dengan isi. Membaca secara utuh membantu memahami konteks sebenarnya dari suatu informasi.

Ketiga, Periksa Kredibilitas Sumber. Dalam era banjir informasi, penting untuk memastikan bahwa sumber berita berasal dari lembaga atau media yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan informasi dari akun anonim atau situs yang tidak memiliki rekam jejak jelas.

Keempat, Gunakan Akal Sehat. Jika suatu informasi terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya, besar kemungkinan itu adalah hoaks. Pemikiran kritis dan logika harus menjadi tameng pertama sebelum membagikan sesuatu ke ruang digital.

Kelima, Ungkap Fakta. Sebelum menyebarkan informasi, biasakan untuk memeriksa kebenarannya melalui kanal periksa fakta yang kredibel atau lembaga resmi, seperti Kementerian Kominfo, Bawaslu, maupun media mainstream yang terverifikasi Dewan Pers.

Keenam, Awasi Penyebar. Waspadaai akun, grup, atau situs yang sering membagikan informasi mencurigakan. Tindakan sederhana seperti melaporkan akun penyebar hoaks dapat mencegah dampak yang lebih luas.

Ketujuh, Luruskan Informasi. Setelah mengetahui bahwa suatu kabar adalah hoaks, masyarakat diharapkan ikut aktif menyebarkan klarifikasi atau fakta yang benar agar tidak terjadi misinformasi berkelanjutan.



Iskardo menegaskan, dalam konteks pengawasan pemilu dan kehidupan berbangsa, Bawaslu memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ruang publik dari pengaruh destruktif informasi palsu.

“Kami tidak hanya bekerja dalam konteks pengawasan tahapan pemilu, tetapi juga memastikan agar masyarakat memiliki daya tahan terhadap manipulasi informasi. Demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika warganya berpengetahuan dan berfakta,” kata Iskardo menambahkan.

Ia juga menyoroti bahwa penyebaran hoaks sering kali meningkat menjelang momen politik, terutama saat isu sensitif seperti agama, suku, dan politik identitas muncul. Oleh sebab itu, Bawaslu mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan generasi muda, untuk menjadi “duta kebenaran” di lingkungannya masing-masing.

“Kita tidak bisa melawan hoaks sendirian. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor Seperti pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat budaya verifikasi. Mari kita jadikan ‘Tujuh Jurus Faktual’ ini sebagai panduan bersama dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat di Lampung,” tutupnya.



Melalui kampanye ini, Bawaslu Lampung berharap masyarakat semakin waspada terhadap hoaks yang dapat memecah belah persatuan. Langkah preventif ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu dalam memperkuat pengawasan partisipatif, meningkatkan literasi publik, serta menjaga integritas demokrasi di Provinsi Lampung dan Indonesia secara umum.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)

No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG TEGASKAN ASN WAJIB NETRAL PADA PSU KABUPATEN PESAWARAN: NETRALITAS DI DUNIA NYATA DAN DUNIA MAYA SAMA PENTINGNYA

BANDAR LAMPUNG, 02 Mei 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran. Kewajiban ini berlaku tidak hanya dalam aktivitas langsung di lapangan, tetapi juga di ruang digital, khususnya media sosial.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul diterbitkannya imbauan resmi Bawaslu Lampung mengenai “ASN Dilarang Memberikan Dukungan kepada Pasangan Calon atau Calon Tertentu pada PSU Kabupaten Pesawaran”. Dalam imbauan tersebut, ASN diminta untuk menahan diri dari segala bentuk tindakan yang dapat ditafsirkan sebagai keberpihakan, termasuk melalui unggahan, komentar, tanda suka (like), berbagi (share), hingga mengikuti (follow) akun pemenang pasangan calon di media sosial.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa ASN memegang peran penting dalam menjaga marwah demokrasi, terutama di masa pelaksanaan PSU yang rawan gesekan politik.

“Netralitas ASN adalah pilar utama demokrasi yang sehat. ASN harus berdiri di tengah, tidak menunjukkan keberpihakan baik secara langsung maupun melalui simbol, gestur, atau aktivitas di media sosial,” ujar Iskardo dalam keterangannya di Bandar Lampung.



Menurutnya, ASN sebagai pelayan publik wajib menunjukkan profesionalisme, integritas, dan keteladanan.

“ASN bukan hanya dituntut untuk netral di tempat kerja atau di lingkungan masyarakat, tetapi juga dalam dunia maya. Satu like atau satu unggahan yang bernuansa dukungan politik dapat menimbulkan persepsi keberpihakan. Ini yang harus dihindari,” tegasnya.

Bawaslu Lampung menjabarkan beberapa larangan bagi ASN di media sosial selama pelaksanaan PSU Kabupaten Pesawaran, di antaranya:

1. Membuat postingan, komentar, berbagi (share), atau memberikan tanda suka (like) dalam grup atau akun pemenangan pasangan calon.
2. Melakukan sosialisasi atau kampanye online untuk pasangan calon tertentu.
3. Mengunggah foto bersama pasangan calon atau tim pemenangan yang menunjukkan simbol keberpihakan, menggunakan atribut atau latar belakang gambar yang terkait dengan pasangan calon.
4. Berfoto atau berinteraksi dengan alat peraga kampanye yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk dukungan.

Larangan tersebut bersandar pada aturan netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN, serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait pemilihan kepala daerah.

Selain mengingatkan ASN, Bawaslu Lampung juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan media, untuk turut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran netralitas ASN.

“Keterlibatan masyarakat sangat penting. Pengawasan partisipatif akan membantu menciptakan PSU yang jujur, adil, dan damai. Kami membuka ruang pelaporan yang seluas-luasnya bagi publik,” tambah Iskardo.



Ia menekankan bahwa pengawasan publik bukan berarti mencari kesalahan ASN, tetapi untuk menjaga integritas proses demokrasi agar tetap bersih dari praktik-praktik yang mencederai keadilan pemilu.

Lebih jauh, Bawaslu Lampung juga menyoroti pentingnya menjaga ruang digital dari polarisasi politik yang dapat memperkeruh suasana menjelang PSU. Media sosial kini menjadi ruang komunikasi publik yang sangat berpengaruh terhadap opini masyarakat, sehingga ASN diminta lebih berhati-hati dalam berinteraksi di platform digital.

“Media sosial bukan ruang bebas nilai. Apa yang ASN tulis atau bagikan di sana mencerminkan posisi dan etika profesionalisme mereka. Karena itu, kamiimbau agar ASN lebih bijak dalam berinteraksi di dunia maya, terutama menjelang PSU Pesawaran,” jelas Iskardo.

Bawaslu Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi, edukasi, dan patroli pengawasan baik secara langsung maupun daring (online) selama tahapan PSU berlangsung. Tujuannya agar seluruh proses berjalan dengan damai, rukun, dan bermartabat, sesuai prinsip pemilu yang luber dan jujur.



“Kami percaya, keberhasilan PSU bukan hanya ditentukan oleh penyelenggara dan peserta, tetapi juga oleh kedewasaan ASN dan masyarakat dalam menjaga netralitas serta menghormati perbedaan pilihan. Mari bersama-sama kita wujudkan PSU Pesawaran yang damai dan demokratis,” tutup Iskardo.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG TEGASKAN BELUM ADA PEMBUKAAN RESMI REKRUTMEN CALON ANGGOTA BAWASLU PERIODE 2025-2030

BANDAR LAMPUNG, 13 Mei 2025 - Belakangan ini, masyarakat di sejumlah daerah mulai menerima informasi yang beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan mengenai pembukaan pendaftaran calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2025-2030. Menyikapi hal tersebut, Bawaslu Provinsi Lampung menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan belum ada pengumuman resmi mengenai rekrutmen calon anggota Bawaslu untuk periode tersebut.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa hingga saat ini Bawaslu RI belum mengeluarkan pengumuman resmi tentang tahapan atau jadwal rekrutmen calon anggota Bawaslu, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan isu tersebut untuk menyebarkan informasi palsu atau bahkan melakukan penipuan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi Bawaslu. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari Bawaslu RI terkait pembukaan rekrutmen calon anggota Bawaslu periode 2025-2030,” tegas Iskardo P. Panggar, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung.

Iskardo menambahkan bahwa seluruh informasi resmi terkait proses rekrutmen akan diumumkan secara terbuka dan dapat diakses melalui laman resmi Bawaslu di www.bawaslu.go.id, serta melalui akun media sosial resmi Bawaslu RI dan Bawaslu

Provinsi di masing-masing daerah. Ia juga menegaskan bahwa setiap tahapan seleksi anggota Bawaslu tidak dipungut biaya apapun.



“Bawaslu berkomitmen menjaga transparansi dan integritas dalam setiap proses rekrutmen. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena semua proses dilakukan secara terbuka dan profesional. Kami pastikan tidak ada biaya dalam bentuk apapun yang dibebankan kepada peserta,” ujar Iskardo.

Lebih lanjut, Bawaslu Lampung juga mengingatkan bahwa praktik penyebaran informasi palsu atau hoaks terkait rekrutmen lembaga publik dapat merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik institusi negara. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam memverifikasi setiap informasi yang diterima, terutama yang berkaitan dengan proses seleksi pejabat publik.

“Apabila masyarakat menemukan informasi yang mencurigakan atau mengatasnamakan Bawaslu, segera konfirmasi ke kantor Bawaslu terdekat atau hubungi kanal resmi Bawaslu. Jangan memberikan data pribadi apalagi uang kepada pihak yang tidak dikenal,” tambahnya.

Bawaslu Lampung juga menekankan pentingnya literasi digital di tengah meningkatnya arus informasi menjelang tahapan pemilu dan pilkada serentak mendatang. Kesadaran masyarakat dalam memilah informasi menjadi kunci penting agar tidak mudah terpengaruh oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi.

Melalui klarifikasi ini, Bawaslu Provinsi Lampung berharap agar masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung, dapat lebih berhati-hati dan menjadikan sumber resmi Bawaslu sebagai rujukan utama terkait segala informasi rekrutmen maupun tahapan pengawasan pemilu.



“Kami ingin memastikan bahwa proses rekrutmen anggota Bawaslu dilakukan secara kredibel, transparan, dan profesional. Jangan sampai masyarakat dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bawaslu akan menindak tegas jika ada pihak yang terbukti menyalahgunakan nama lembaga,” tutup Iskardo P. Panggar.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)

SIARAN PERS

BAWASLU PROVINSI LAMPUNG AJAK MASYARAKAT PESAWARAN SUKSESKAN PSU DENGAN DAMAI DAN RUKUN “BEDA PILIHAN ITU BIASA, JAGA KERUKUNAN BARU LUAR BIASA”

BANDAR LAMPUNG, 20 Mei 2025 - Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesawaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung mengajak seluruh masyarakat, peserta pemilu, dan pemangku kepentingan untuk menjaga kedamaian, kerukunan, dan semangat persaudaraan di tengah perbedaan pilihan politik.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa pelaksanaan PSU merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, dan sikap dewasa dalam berpolitik.

Menurutnya, masyarakat Lampung, khususnya di Kabupaten Pesawaran, memiliki tradisi gotong royong dan nilai-nilai kebersamaan yang kuat nilai inilah yang menjadi modal utama untuk menjaga stabilitas sosial selama pelaksanaan PSU.

“Beda pilihan itu hal yang wajar dalam demokrasi. Tapi menjaga kerukunan di tengah perbedaan, itu yang luar biasa. Kami mengajak semua pihak untuk memandang perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk terpecah,” tegas Iskardo.

Ia juga menekankan bahwa PSU bukan sekadar ajang memilih ulang pemimpin, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu Lampung bersama Bawaslu Kabupaten Pesawaran akan mengerahkan seluruh sumber daya pengawasan untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan dengan bersih, tertib, dan damai.



Dalam kesempatan yang sama, Iskardo mengingatkan agar seluruh peserta Pilkada, baik pasangan calon maupun tim pemenangan, tetap mematuhi aturan yang berlaku, serta mengedepankan politik santun dan edukatif. Bawaslu, katanya, akan bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang berpotensi mengganggu integritas pemilu.

“Kami ingin PSU di Pesawaran menjadi contoh baik bagi daerah lain. Bahwa masyarakat bisa berpartisipasi aktif tanpa harus diwarnai konflik. Mari kita tunjukkan kedewasaan berdemokrasi dengan datang ke TPS, menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, dan tetap menjaga tali persaudaraan,” ujar Iskardo.

Bawaslu juga mengimbau seluruh pemilih untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar atau bersifat memecah belah. Iskardo meminta masyarakat agar selalu memeriksa kebenaran berita yang beredar, serta melapor kepada Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran atau praktik yang mencederai asas pemilu.

Lebih lanjut, Bawaslu Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam memastikan seluruh proses PSU, mulai dari distribusi logistik, tahapan pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil, diawasi dengan ketat dan transparan. Koordinasi intensif juga dilakukan bersama KPU, aparat keamanan, dan stakeholder terkait demi menjaga situasi kondusif.

“Kami percaya, dengan kerja sama semua pihak, PSU di Pesawaran akan berjalan sukses, aman, dan damai. Mari jadikan perbedaan sebagai energi positif untuk membangun demokrasi yang lebih matang di Lampung,” tutup Iskardo.



Pelaksanaan PSU di Kabupaten Pesawaran menjadi momentum penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk menunjukkan kedewasaan politik dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Melalui semangat kebersamaan dan kedamaian, Bawaslu Lampung berharap proses demokrasi di daerah tersebut dapat berjalan sesuai harapan rakyat adil, transparan, dan bermartabat.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)

No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)